

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hairan, 2017. *Hukum dan Dinamika Pembangunan (Perspektif Filsafat Hukum Profektif)*. Malang: CV Nuswantara

Johnny Ibrahim, 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia

Bambang Sunggono, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana

Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Koenjaraningrat, 1991. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia

Andi Hamzah, 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Melton Putra

Syarif, Mujar Ibnu, 2003. *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam*. Bandung: Angkasa

Evi Hartanti, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

Elwi Danil, 2016. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers



## B. Jurnal

Karunia, Ana Aniza, 2022. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M . Friedman*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1

Andiyani, Alivia Reva, 2010. *Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia dan Singapura*. *Reclive*, Volume 10 No. 1

Purba, Dennis Efraim, 2021, *Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1

Henny Yuningsih, 2020, “*Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, *Simbur Cahaya*, volume 27 Nomor 2, hlm 151

Tambunan, Erick Palovi, dkk, 2022. *Analisi Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Rectum, Vol. 4 No. 1

Adrianus Bawamenewi , 2019. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta Edisi:61

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
(KUHAP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas  
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

#### **D. Internet**

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Hasil%20Pema  
ntauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Paparan%20Hasil%20Pema<br/>ntauan%20Tren%20Vonis%202021.pdf) diakses pada tanggal 18  
Januari 2024 jam 20.00 WIB

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi\\_Tren%20Vonis%202  
022\\_1.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi_Tren%20Vonis%202<br/>022_1.pdf) diakses pada tanggal 18 Januari 2024 jam 20.10 WIB

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/NA\\_dan\\_RUU\\_Tipikor.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/NA_dan_RUU_Tipikor.pdf)  
diakses pada tanggal 3 September jam 19.30 WIB

<https://pasla.jambiprov.go.id/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/>  
diakses pada tanggal 21 Februari 2024 jam 20.30 WIB

<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> diakses pada tanggal 21 Februari 2024 jam  
21.00 WIB

<https://digilib.unila.ac.id/9849/5/4.PEMBAHASAN.pdf> diakses pada tanggal

21 Februari 2024 jam 21.02 WIB

<https://repository.unair.ac.id/98286/4/4.%20BAB%201%20.pdf> diakses pada

tanggal 20 Januari 2014 jam 16.00 WIB

#### **E. Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Jkt.Pst, atas nama Juliari P.

Batubara

Putusan Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Jkt.Pst, atas nama Muhammad azis

Syamsuddin

Putusan Nomor: 130/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Jkt.Pst, atas nama Setya Novanto

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 4/PUUVII/2009 24 Maret 2009

#### **F. Kamus**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

